

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, mengapa pariwisata Indonesia dalam realitanya ternyata tertinggal dari Thailand, Singapura dan Malaysia. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari jumlah devisa yang diperoleh ketiga negara tersebut dan jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi obyek-obyek wisata di ketiga negara ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperoleh Indonesia. Sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah lama menyadari bahwa sektor pariwisata dapat diandalkan untuk menjadi salah satu sumber penerimaan resmi negara ini. Selain itu, selama ini Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk memajukan dunia pariwisata Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan pengelolaan obyek wisata dengan melibatkan atau mengajak pihak-pihak di luar pemerintahan. (Studi et al. 2016)

Pengelolaan objek wisata tidak hanya menjadi urusan pemerintah sebagai komponen utama yang terlibat, namun ada beberapa elemen pemangku kepentingan lainnya yang turut memiliki proporsi untuk membangun, mengembangkan, dan menjaga eksistensi pariwisata yaitu masyarakat maupun swasta. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata seringkali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukanlah bagian dari stakeholder yang terlibat dalam pariwisata, sehingga seringkali

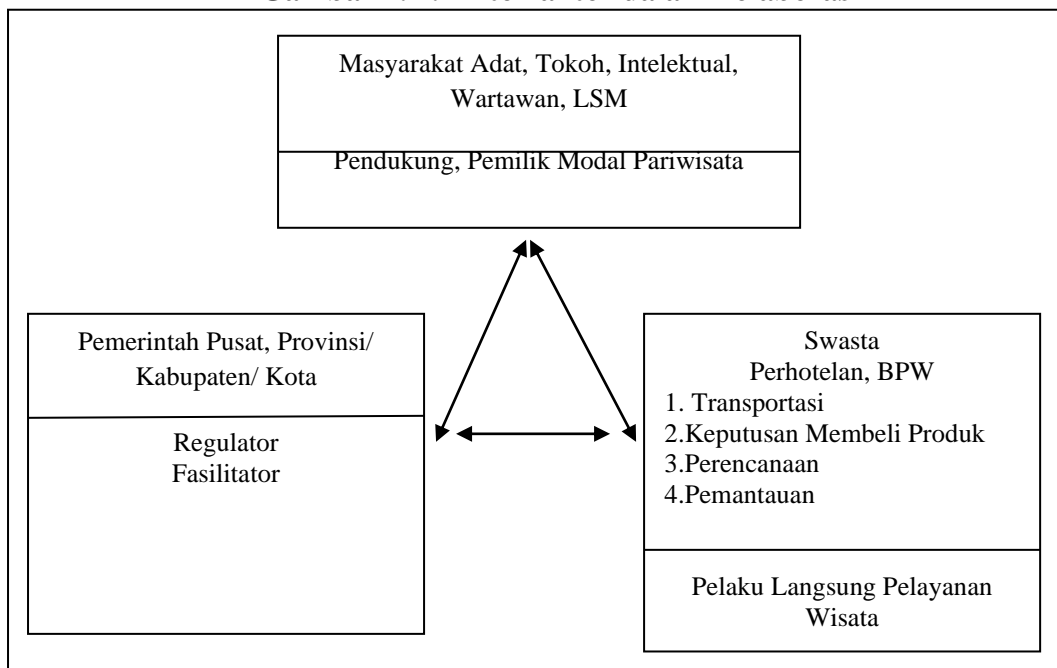
dalam posisi yang termajinkan. Meskipun begitu pada dasarnya masyarakat sekitar destinasi wisata lebih mengetahui keadaan lokasi destinasi dibandingkan dengan pemerintah,

Selain itu menurut (Pike (2004) dalam Adikampana 2017) menuturkan bahwa masyarakat lokal memiliki potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi produk pariwisata. Potensi tersebut berupa budaya lokal, tinggalkan masyarakat, serta festival menyediakan keunikan dan sesuatu yang baru dari perspektif wisatawan. Masyarakat dengan pengetahuan dan kebijakan lokal akan lebih memahami produk pariwisata yang dikembangkan serta dampak yang ditimbulkan, dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya diluar masyarakat. Masyarakat lokal juga mempunyai kontribusi dalam upaya mempromosikan produk destinasi pariwisata, karena masyarakat lokal adalah komponen utama pemebentuk citra atau image destinasi pariwisata. Namun menurut (Nurmansyah 2014) yang disayangkan, masyarakat lokal memiliki keterbatasan kemampuan secara finansial dan keahlian untuk mengelola pariwisata, sehingga untuk memperoleh kualitas dan *output* yang baik maka perlu membangun kerjasama dengan cara kolaborasi dengan pemerintah sebagai ujung tombak pengembangan pariwisata kedepannya.(Nurmansyah 2014)

Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun swasta dalam mengelola suatu potensi pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah, para pakar sering menyebutnya dengan istilah *collaborative governance*. *Collaborative governance* sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk baru dari

proses tata kelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang berbeda dalam hubungan kerja satu sama lain melalui dialog rutin dan interkasi dalam mengejar tujuan bersama (Innes dan Booher, 2004; Huxham 2000). Adapun Model *collaborative governance* yaitu merupakan sebuah praktik tata kelola yang menghargai keragaman nilai, tradisi, dan budaya organisasi, bekerja dalam struktur yang relatif longgar dan berbasis pada jaringan, dikendalikan oleh nilai-nilai dan tujuan bersama, serta memiliki kapasitas mengelola konflik (Dwiyanto, 2012: 292). Tata kelola kolaboratif seperti ini sangat tepat dan sangat diperlukan untuk mengurus proyek bersama antar institusi pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam mengelola obyek pariwisata.

Gambar 1.1 . Aktor-aktor dalam kolaborasi



Sumber: Zaenuri, M (2018)

Ketiga pilar *governance* (pemerintah, masyarakat dan swasta) dapat berjalan baik dan bersinergi apabila ada saling interaksi diantara para

stakeholders dengan tujuan dan misi yang sama (Bovaird & Loffler, 2009). Dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh ketiga pilar tersebut maka akan meningkatkan potensi atau kapasitas yang dimiliki suatu daerah dalam menyelenggarakan urusan pariwisata. Vigoda (2002) mengatakan bahwa agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat lebih akseleratif lagi maka responsifitas *stakeholders* saja tidak cukup, perlu adanya perubahan orientasi dari responsifitas ke kolaborasi, hal ini yang menurutnya sebagai *the next generation of public administration*, sedangkan menurut Sorensen dan Torfing (2012) kolaborasi ini disebutnya sebagai inovasi di sektor publik.

Adapun alasan diadakannya kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta yang dikemukakan oleh Widodo (2004), yaitu:

1. Alasan politis, yaitu menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong perwujudan *good governance* dan *good society*.
2. Alasan *administrative*, adanya keterbatasan sumber daya anggaran, SDM, aset, maupun kemampuan manajemen.
3. Alasan ekonomis, yaitu mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, mengacu pada pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta mengurangi resiko.

Menurut Zaenuri, M. (2015) permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam kolaborasi pariwisata yakni, terkait distribusi urusan dengan pemerintah pusat atas tindak lanjut urusan administrasi. Kemudian tidak diimbangnya fasilitas seperti bimbingan, intruksi, standar, manusia pelatihan dan pengawasan sumber daya seperti halnya yang sudah di tugaskan

pemerintah pusat. Selain itu, gesekan yang timbul antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai konsep hubungan dan tolak ukur tentang lintas kabupaten/kota dan hirarki, karena kabupaten / kota bukan bawahan provinsi. Namun, masalah utama menyangkut bisnis pariwisata juga disampaikan, bahwa pariwisata adalah terbatasnya kapasitas lokal maka urusan pariwisata tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah itu sendiri. Oleh sebab itu urusan pariwisata dibutuhkan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak diluar pemerintah yaitu pihak swasta dan masyarakat. Kemudian sektor pariwisata merupakan masalah pilihan, tidak wajib, sehingga nantinya ada beberapa pihak yang akan menjadikan pariwisata tidak dianggap sebagai area yang penting dibandingkan bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dll. (Zaenuri et al. n.d.)

Salah satu sektor publik yang sangat potensial jika dalam pengelolaannya dilakukan menggunakan metode *Collaborative governance* yaitu adalah sektor Pariwisata. Karena jika sektor pariwisata dalam pengembangan dan pemeliharaan dilakukan secara baik dan maksimal, maka sektor ini akan mengakibatkan pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu kolaborasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta (*stakeholders*) di bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor nonmigas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Usaha mengembangkan dunia pariwisata ini didukung dengan UU No 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa

keberadaan 3 objek wisata pada suatu daerah sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota Kabupaten di Temanggung dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang di sisi selatan, Kabupaten Semarang di sisi timur, Kabupaten Kendal di sisi utara dan Kabupaten wonosobo di sisi barat. Saya sebagai peneliti tertarik mengangkat salah satu sektor yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu sektor pariwisata, karena Kabupaten Temanggung memiliki banyak potensi pariwisata baik potensi alam potensi masyarakat maupun potensi budaya. Kabupaten Temanggung memiliki potensi di sektor pariwisata yang sangat besar untuk dikembangkan. Dengan memanfaatkan potensi pariwisata daerah lokal dengan baik dan benar maka tentunya dapat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah karena mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Temanggung.

Menurut (Zaenuri, 2012) Adapun yang dimaksud dari pariwisata itu sendiri adalah berbagai macam kegiatan dan atau perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan selama berpergian dan tinggal di lingkungan di luar lingkungan kesehariaanya untuk sementara,memenuhi berbagai keperluan liburan, bisnis, kesehatan, religi dan lain-lain; serta berbagai

fasilitas dan pelayanan yang diciptakan oleh pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berwisata.

Sedangkan menurut Macintosh(dalam Oka : 2008) mengatakan , “ Pariwisata adalah sejumlah gejala dan hubungan yang timbul, mulai interaksi antara wisatawan di satu pihak, perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan dan pemerintah serta masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan dimaksud”. MacIntosh (dalam Oka : 2008) menekankan pada 4 unsur penting, yaitu :

1. Wisatawan (*tourist*), yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata.
2. Para pemasok (*business suppliers*), yaitu perusahaan yang menyediakan kebutuhan dan keinginan sertapelayanan.
3. Pemerintah (*host government*) yang berwenang menetapkan kebijakan, mengatur dan mengarahkan agar wistawan dapat dilayani dengan baik.
4. Masyarakat (*host communities*) yang bertindak sebagai tuan rumah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.

Berdasarkan sumber pra penelitian dari penulis, sebenarnya potensi pariwisata di daerah-daerah Kabupaten Temanggung sangatlah banyak, bila mampu dan mau memanfaatkan potensi-potensi yang ada, pemerintah dan masyarakat daerah saling membantu atau kolaborasi dalam

pengembangannya, sehingga akan mengangkat segi ekonomi, budaya dan pendidikan daerah tersebut. Bentuk pengembangan pariwisata dapat berupa pengembangan atraksi atau obyek wisata, pengadaan dan rehabilitas sarana dan prasarana pariwisata pengembangan di bidang pemasaran dan promosi serta bentuk lainnya. Pariwisata adalah salah satu cara yang dapat mengatasi masalah kesejahteraan bila dikembangkan secara profesional.

Salah satu fakta masalah yang ada adalah Kabupaten Temanggung berada diantara dua Kabupaten yang memiliki potensi wisatanya lebih dikenal orang, khususnya turis asing. Terutama Candi Borobudhur (Kabupaten Magelang) dan dataran tinggi Dieng (Kabupaten Wonosobo) sehingga Kabupten Temanggung di sini posisinya sebagai daerah transit atau daerah ampiran atau Daerah Antar Tujuan Wisata (DATW), belum sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Adapun perbandingan jumlah wisatawan dari ketiga kabupaten tersebut berdasarkan data terakhir yang didapat adalah seperti berikut; Kabupaten Wonosobo di tahun 2017 sebesar 1.099.432 wisatawan, lalu berdasarkan data yang dikutip dari (Tribun Jogja, 2019) Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 5.402.084 wisatawan dan Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 hanya sebesar sekitar 30.000 wisatawan (Suara Merdeka.com, 2018). Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Temanggung memliki selisih yang begitu besar dengan Kabupaten yang berada disekitar wilayah Kabupaten Temanggung, yaitu Kabupaten wonosobo dan Kabupaten magelang. Pada umumnya para wisatawan melewati

Kabupaten Temanggung setelah atau akan mengunjungi Semarang-Dieng atau Yogyakarta- Borobudhur. Dalam hal ini saya sebagai penulis memiliki cita cita dan optimis suatu saat Kabupaten Temanggung akan menjadi daerah tujuan wisata, karena Pemerintah Daerah akhir-akhir ini sangat menaruh perhatian pembangunannya terhadap sektor pariwisata.

Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Temanggung menjadi salah satu tumpuan pada ekonomi kerakyatan dan berorientasi global yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya, lingkungan hidup, persatuan dan kesatuan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang dinamis dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengembangkan perekonomian kerakyatan dan pertumbuhan kawasan yang dinamis sehingga Kabupaten Temanggung bukan lagi menjadi Daerah Antar Tujuan Wisata (DATW) tetapi dapat dijadikan Daerah Tujuan Wisata (DTW). Mengembangkan potensi wisata daerah sehingga keberadaanya mampu menjadi Obyek Wisata atau Kawasan Wisata sebagai realisasi upaya menjadikan Kabupaten Temanggung sebagai Daerah Tujuan Wisata (DWT). Ikut mendorong terciptanya Citra Positif Kepariwisataan dengan didukung Sumber Daya Manusia Pariwisata yang memadai. Dengan dukungan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang memadai maka akan mendorong tumbuhnya simpul-simpul kegiatan wisata yang melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dan mempunyai rasa memiliki, sehingga obyek wisata terus berkembang.

Kabupaten Temanggung sendiri memiliki khazanah pariwisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata pegunungan pendakian, wisata

budaya, wisata buatan dan desa wisata. Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah Wana Wisata Umbul Jumprit, Situs Liyangan , Rest Area Kledung, dan Obyek Wisata Alam Posong. Penyebaran destinasi wisata di wilayah Kabupaten Temanggung tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi dalam industri pariwisata antara lain: Pertama, masih banyaknya destinasi yang (a) belum siap bersaing dipasar global, disebabkan belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata; (b) belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pariwisata; (c) belum optimalnya kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, (d) belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi dibidang pariwisata; Kedua, belum efektifnya pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata. Ketiga, terbatasnya daya saing sumber daya pariwisata seperti terbatasnya jumlah, jenis, dan kualitas SDM.

Salah satu tempat wisata yang masih terbilang baru dan sedang naik daun dikalangan milenial di daerah Kabupaten Temanggung dan sekitarnya adalah Objek Wisata Alam Posong. Posong dewasa ini menjadi tempat wisata alam yang populer di Kabupaten Temanggung dan cukup terkenal di wilayah Jawa Tengan dan DIY. Posong merupakan salah satu obyek pariwisata yang menjadi andalan Kabupaten Temanggung. Posong hanya berjarak 3,5km dari jalan Raya Temanggung-Wonosobo dan Akses jalan menuju obyek wisata yang sudah mudah dan bagus membuat

pengunjung sering berkunjung ke Obyek Wisata alam Posong (temanggungkab.go.id).

Obyek Wisata Alam Posong awalnya merupakan lahan pertanian dan hanya dikunjungi oleh beberapa pengunjung sekitar obyek, namun setelah adanya pengembangan obyek yang diantaranya adalah pembangunan fasilitas pendukung berupa gazebo, mushola, toilet, lahan parkir dan *camping ground* jumlah pengunjung semakin meningkat. Sumber dana untuk pengembangan obyek ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Temanggung tahun 2011 dan tahun 2013.

Posong terletak di ketinggian 1.900 meter diatas permukaan laut (mdpl) tepatnya di lereng Gunung Sindoro, di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Obyek Wisata Alam Posong ini menyuguhkan keindahan pemandangan alam dari lereng Gunung Sindoro berupa; hamparan kebun tembakau dan kopi dengan pohon cemara sebagai pemisahannya. Obyek Wisata Alam Posong ini terutama menyuguhkan *sunrise* atau matahari terbit pada pagi hari dan dari tempat kita melihat *sunrise* kita dapat juga melihat berbagai gunung yang mengelilingi Obyek Wisata Alam Posong ini, yaitu berupa Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Andong, Gunung Ungaran dan tampak di kejauhan Gunung Muria.(Studi et al. 2008)

Adapun dalam pengelolaannya, Objek Wisata Alam Posong awal mulanya dikelola secara swadaya oleh masyarakat sekitar dan pemerintah desa setempat. Semakin bertambahnya jumlah pengunjung atau wisatawan,

menjadikan Objek Wisata ini menarik minat investor untuk ikut andil dalam pengembangan objek wisata. Jadi menurut sumber dari pra penelitian penulis dapat disimpulkan sementara, bahwa Objek Wisata Alam posong dikelola bersama antara masyarakat sekitar yang merupakan anggota dari kelompok sadar wisata (POKDARWIS), dari pihak swasta sebagai investor dan dari pihak pemerintah desa ada BUMDES sebagai mitra kerja dari masyarakat dan swasta. Pengelolaan objek wisata tersebut tidak terlepas dari peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata(DisBudPora) Kabupaten Temanggung yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata dan mempunyai tugas atau peran menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataaan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian di Obyek Wisata Alam Posong. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkatnya kedalam tulisan skripsi dengan judul **“KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA ALAM POSONG DI DESA TLAHAB KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

Bagaimanakah kolaborasi pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa Tlahap, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2019 ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Menjelaskan tentang kolaborasi atau kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat, serta peran (*stakeholders*) dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

2. Manfaat

- a. Manfaat Teoritis
 1. Untuk memahami peran masing-masing stakeholders dalam proses collaborative governance dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.
 2. Menambah wawasan peneliti maupun pembaca mengenai kolaborasi atau kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

b. Manfaat Praktis

Menjadi bahan rujukan dan pertimbangan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam membuat kebijakan mengenai kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Temanggung, khususnya pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong.

D. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini menggunakan 15 (lima belas) *literature review* yang berbeda-beda yang akan diklasifikasikan sebagai berikut : yang pertama penelitian tentang pengembangan kerjasama pemerintah dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut; 1. Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis *Collaborative Governance* Konsep, Analisis dan Pemodelan, 2. Peran Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis) Sendang Arum dalam Pengembangan Potensi Pariwisata (studi kasus di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung), 3. Proses Kolaboratif dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi pada Masyarakat Nonkolaboratif, 4. Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik, 5. Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, 6. Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan, 7. Model Kolaborasi Perencanaan Antara Balai Taman Nasional Wakatobi Dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Dalam Pengelolaan Sumber

Daya Alam Hayati Secara Lestari, 8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Industri Kecil dan 9. *Tourism Affair Management With Collaborative Governance Approach: Tourism Affairs Management Studies In Sleman Regency*, Yogyakarta. Penelitian tersebut diatas membahas tentang pengertian dari kolaborasi, bentuk bentuk kolaborasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dan tujuan dari kolaborasi.

Yang kedua penelitian tentang 10. *Pengelolaan Obyek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Malapeh Kecamatan Linggang Bigung*, 11. *Pengelolaan Obyek Wisata Kawasan Candi Berbasis Kearifan Lokal dan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif *Community Based Tourism* (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)*. Penelitian tersebut membahas tentang apa itu pengelolaan, strategi dalam pengelolaan dan membahas tentang keunggulan obyek wisata dan kelemahan obyek wisata di daerah tertentu.

Yang ketiga penelitian tentang 12. *Potensi Pariwisata Dalam Perekonomian Indonesia*, 13. *Studi Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun Wiyono di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Provinsi Lampung*, 14. *Pengembangan Desa Wisata Eramaya Kabupaten Temanggung Studi Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat*, 15. *Strategi Promosi Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung* Penelitian tersebut membahas tentang apa itu pariwisata,

pariwisata sebagai sumber pendapatan terbesar ke dua untuk Indonesia dan strategi dalam pengembangan pariwisata di daerah tertentu.

Dari keseluruhan *literature review* penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana peneliti akan memfokuskan penelitian tentang kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2019, sehingga dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada dan ingin melanjutkan penelitian sebelumnya. Berikut ini penjelasan ringkasan dari keseluruhan *literature review* dari beberapa penelitian:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Ringkasan
1	Zaenuri, M. (2018)	Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis <i>Collaborative Governance</i> Konsep,Analisi dan Pemodalan	Penelitian tentang upaya mengevaluasi <i>Collaborative Governance</i> dalam tata kelola pariwisata-bencana di <i>volcano tour</i> Merapi. Dalam penelitian ini dihasilkan tesis yang berbeda dengan berbagai teori tentang <i>Collaborative Governance</i> bahwa dalam kontek pariwisata-bencana <i>collaborative governance</i>

			<p>mengalami transformasi dari hubungan yang bersifat informal menjadi formal, dari komando menuju kolaborasi dan dari <i>shared vision</i> menuju kemitraan. Penelitian ini menjelaskan secara detail bagaimana transformasi yang terjadi dalam kolaborasi dalam bidang pariwisata, dan khususnya pada saat setelah bencana.</p>
2	Agung Suryawan (2016)	Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sendang Arum dalam Pengembangan Potensi Pariwisata (studi kasus di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung)	<p>Penelitian tersebut menjelaskan tentang tujuan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata Sendang Arum, yaitu untuk mengangkat potensi pariwisata yang ada di Desa Wisata Tlahap, kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Kelompok Sadar Wisata</p>

			Sendang Arum, dan penelitian tersebut menjelaskan peran penting Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pengembangan pariwisata di Desa Tlahab.
3	Ely Sufianty, Dewi Sawitri, Krishnai Nur Pribadi, Tommy Firman (2013)	Proses Kolaboratif dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi pada Masyarakat Nonkolaboratif	Penelitian tersebut menjelaskan tentang proses kolaboratif merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan berbasis komunikasi. Proses ini memerlukan partisipasi tinggi, kesetaraan kekuasaan dan para aktor yang kompeten. Namun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses kolaboratif telah terjadi pada masyarakat dengan tingkat partisipasi rendah, ketidaksetaraan kekuasaan, kompetensi rendah. Proses ini dimulai

			<p>dengan membangun kepercayaan melalui hubungan, membangun peahaman bersama melalui timbal balik, dan membangun komitmen untuk mengimplementasikan pemecahan masalah melalui adaptasi terhadap sistem. Serangkaian tahapan tersebut terjadi melalui suatu proses dialog tatap muka. Dengan demikian, dialog tatap muka bukan merupakan bagian dari tahapan, tetapi terjadipada semua tahapan kolaboratif.</p>
4	Nanang haryono (2012)	Jejaring Untuk Memabangun Kolaborasi Sektor Publik	<p>Penelitian tersebut menjelaskan tentang kolaborasi antara <i>government</i>, <i>civil society</i> dan <i>private sector</i> merupakan langkah-langkah optimalisasi peran government dalam</p>

		<p>implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah kolaborasi merupakan langkah tatanan pemerintah abad 21. Melalui tatanan pemerintahan <i>new public governance</i> dimana didalamnya memfokuskan pada lima prinsip diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>social-political governance</i> b. <i>public policy governance</i> c. <i>administrative governance</i> d. <i>contract governance</i> e. <i>network governance</i> <p>Keterlibatan semua pihak antara <i>government</i>, <i>civil society</i> dan <i>private sector</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitarianism dan demokrasi melahirkan tata</p>
--	--	---

			pemerintahan yang mengedepankan <i>society</i> .
5	Sri Yuliani, Gusty Putri Dhini Rosyida (2017)	Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta	Penelitian tersebut menjelaskan tentang bahwa kolaborasi yang terjadi dalam perencanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dimana seharusnya berjalan dengan menggunakan konsep kolaborasi sesuai dengan SE DJCK No 40 Tahun 2016 tentang pedoman umum program KOTAKU tidak semua prinsip berjalan sebagaimana mestinya. Seperti prinsip partisipasi, komunikasi dan berbagi . tapi dalam prinsip akseptasi dan percaya sudah berjalan dalam kolaborasi program KOTAKU di Kelurahan Semanggi.

6	Novita Tresiana dan Noverman Duadji (2017)	Kolaboratif Pengelolaan Praiwisata Teluk Kiluan	<p>Penelitian tersebut menjelaskan tentang pemenuhan prasyarat masyarakat kolaboratif dalam perencanaan pengelolaan pariwisata, maka perlu dikembangkan model pengelolaan pariwisata berbasis komunitas masyarakat. Implementasi model berbasis masyarakat (komunitas) di dasari lebih banyak keuntungan yang diperoleh yang bukan saja ekonomi, tetapi jauh lebih penting adalah keberlanjutan dari pariwisata kiluan serta kelestarian di sekitar lingkungan pariwisata. Beberapa sub-sub sistem yang mendukung terbentuknya masyarakat kolaboratif berbasis komunitas adalah</p>
---	--	---	---

			<p>penguatan modal sosial, penguatan basis pengambilan keputusan, penguatan kelembagaan masyarakat lokal dan tentunya potensi wisata kiluan. Untuk ketercapaian politik Teluk Kiluan diperlukan dukungan pelaku pariwisata dan perlu dilakukan kajian mendala dalam uji sub-sub sistem yang memiliki pengaruh yang kuat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas.</p>
7	<p>Hery Sopari, Ngakan Putu Oka, Darmawan Salman (2014)</p>	<p>Model Kolaborasi Perencanaan Antara Balai Taman Nasional Wakatobi Dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang sumber daya yang dikelola oleh Balai TN Wakatobi dan Pmerintah Kabupaten Wakatobi dan hingga saat ini masih terdapat berbagai macam permasalahan dalam</p>

		Hayati Secara Lestari	<p>pengelolaan sumber daya tersebut seperti illegal fishing, destructive fishing, penambangan pasir, belum sinerginya pengelolaan, perijinan usaha perikanan dan perijinan pariwisata serta keterbatasan sumber daya. Balai TN Wakatobi dan pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu berkolaborasi untuk memecahkan dan mencari solusi dari masalah tersebut. Salah satunya dengan model kolaborasi perencanaan: penanganan kasus, patrol, penyuluhan, monitoring rehabilitas sumber daya alam hayati, pengelolaan pengunjung, pengelolaan ijin usaha perikanan dan pengembangan perijinan pariwisata.</p>
--	--	-----------------------	---

8	Ratna Trisuma Dewi (2012)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Collaborative</i> <i>Governance</i> Dalam Pengembangan Industri Kecil	Penelitian tersebut menjelaskan tentang bentuk-bentuk koalaborasi yang berupa : penyediaan modal; kolaborasi ini dianggap gagal karena sudah lama terhenti dan masih memerlukan banyak perbaikan untuk menciptakan kolaborasi yang baik. Sosialisasi bahan baku; kolaborasi ini dianggap belum berhasil dan mencapai yang diinginkan sehingga masih perlu adanya perbaikan juga diperlakukan <i>stakeholders</i> lain yang dimungkinkan bisa berkolaborasi untuk membantu penyelesaian masalah ini. Festival Reyog Nasional; kolaborasi ini masih memiliki kekurangan karena masih ada unsur hirarki dan aturan yang diberlakukan
---	------------------------------	---	---

			<p>banyak yang berasal dari atas bukan dari kesepakatan dari <i>stakeholders</i>. Pameran; kolaborasi ini belum bisa dikatakan berhasil.</p>
9	<p>Muchamad Zaenuri, Sumartono, Soesilo Zauhar & Andy Fefta Wijaya</p>	<p>Tourism Affair Management With Collaborative Governance Approach: Tourism Affairs Management Studies In Sleman Regency, Yogyakarta</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang pembagian urusan di bidang pariwisata kemudian pembagian kekuasaan per wilayah atau regional yang dilakukan dengan pendekatan berbagi. Kemudian karena terbatasnya kapasitas local maka urusan pariwisata tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah itu sendiri. Oleh sebab itu urusan pariwisata dibutuhkan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak diluar pemerintah pemerintah yaitu pihak swasta dan masyarakat.</p>

			Kerjasam seperti tersebut dapat disebut juga dengan tata kelola kolaboratif.
10	Yudi Kristia(2017)	Pengelolaan Obyek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Malapeh Kecamatan Linggang Bigung	<p>Penelitian tersebut menjelaskan tentang definisi mengenai pengelolaan dan secara keseluruhan menjelaskan tentang ;</p> <p>Pengelolaan Obyek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Malapeh Kecamatan Linggang Bigung cukup memuaskan para wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:</p> <p>a. Atraksi Wisata yang berupa keindahan alamnya yang sangat memukau serta pemandangan yang berupa hasil ciptaan manusia yakni</p>

		<p>bermacam-macam replica bunga yang terjejer rapi di pintu masuk.</p> <p>b. Aksesibilitas yaitu jalan menuju obyek wisata Danau Aco cukup memuaskan wisatawan karena dapat dilalui dengan baik, yakni bisa dengan berjalan kaki, maupun bisa dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dengan bus maupun dengan mini bus.</p> <p>c. Fasilitas yaitu beberapa unit perahu karet, perahu bebek, serat fasilitas parker yang luas, gazebo 5 unit, toilet umum sebanyak 7 unit, tangga beton untuk turun, jembatan kayu dengan panjang 125 meter di tepi danau, papan informasi dan lain sebagainya.</p> <p>Adapun faktor penghambat</p>
--	--	--

			<p>pengelolaan Obyek Wisata yaitu:</p> <p>Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kampung Linggang Melapeh belum memiliki payung hukum, kemudian kurangnya promosi dari pemerintah selanjutnya kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kepariwisataan dan terbatasnya anggaran dana dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata Danau Aco.</p>
11	Dimas Kurnia Purnada, Wilopo, luchman Hakim (2015)	Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah,	Penelitian tersebut membahas tentang : pengeloalan Desa Wisata Gubugklakah dilaksanakan elalui pengelolaan sumberdaya pariwisata, pengelolaan pemasaran pariwisata,

		Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)	pengelolaan sumberdaya manusia dan manajemen krisis. Penerapan <i>Community based tourism</i> dalam pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah dapat dilihat melalui beberapa hal seperti memastikan keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan pariwisata, pelestarian alam dan budaya dan menjamin adanya pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat <i>citizen control</i>
12	Agung Nurmansyah (2014)	Potensi Pariwisata Dalam Perekonomian Indonesia	Penelitian tersebut menjelaskan tentang sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar kedua bagi penerimaan devisa negara Indonesia setelah minyak dan gas bumi. Pada

		<p>tahun 2009 jumlah wisatawan dalam negeri berjumlah 6.323.730 menjadi 8.802. 129 pada tahun 2013. Dan untuk wisatawan luar negeri dari 5.530.269 menjadi 7.973.440. Ini bukti bahwa pariwisata Indonesia penyumbang bagi devisa negara. Sektor pariwisata mempunyai dampak positif dan negatif, dampak positif : meningkatkan pendapatan, meningkatkan standard hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pengembangan infrastruktur dll. Dampak negatif : membuat harga barang dan jasa menjadi naik, membuat harga tanah dan perumahan naik di lokasi obyek wisata, memberikan</p>
--	--	---

			<p>pelembur dari atau pekerja asing yang biasanya berpotensi menggeser tenaga kerja lokal.</p>
13	<p>Rusita, Rahmat Walimbo, Yunita Sari dan Melda Yanti (2016)</p>	<p>Studi Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun Wiyono di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Provinsi Lampung</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang :</p> <p>a. produk Wisata Air Terjun Wiyono termasuk dalam kualitas tinggi yang terdiri dari unsur keaslian, keunikan, keindahan, keutuhan dan ketersediaan lahan pengembangannya dan aspek kelembagaannya. Walaupun saat ini pengelolaan belum maksimal akan tetapi telah memperoleh perizinan dalam pengembangan pariwisatanya, tetapi ada beberapa hal yang mengurangi kualitas Wisata Air Terjun Wiyono ini yaitu vandalisme, kerusakan jalan setapak, serta</p>

			<p>banyaknya sampah.</p> <p>b. Daya dukung areal wisata Air Terjun Wiyono meliputi daya dukung fisik untuk aktivitas piknik dan berkemah masing-masing sebanyak 759 orang per hari dan 122 orang per hari.</p>
14	Setiyo Utomo (2013)	Pengembangan Desa Wisata Eramaya Kabupaten Temanggung Studi Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat	<p>Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Eramaya yaitu dengan membangun Embung Abimayu yang mendukung pelestarian tanaman durian. Embung Abimayu berada di Kecamatan Kranggan. Memakan Biaya 1.500.000 dan dibangun diatas tanah Pemerintah Kabupaten Temanggung seluas 2Ha. Pemerintah melakukan kerjasam pengembangan Desa</p>

			<p>Wisata Eramaya melalui kelompok sar wisata. Faktor pendukung : sumber daya ala yang sangat baik, potensi ekologis, sumber daya buatan, potensi budaya dan sosial ekonomi. Faktor penghambat : SDM yang berada di sana kurang mumpuni.</p> <p>Pengembangan Desa Wisata Eramaya terkendala dana, infrastruktur jalan menuju Embung Abimayu masih terbuat dari bebatuan, transportasi menuju Desa Wisata Eramaya juag belum bisa dijangkau dengan angkutan umum.</p>
15	Fabrida Robithoh Widyastuti (2013)	Strategi Promosi Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Priwisata, Pemuda dan Olah Raga	Penelitian tersebut membahas tentang Strategi Promosi Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Priwisata, Pemuda dan Olah Raga

		Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung. Faktor yang mendukung promosi wisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung salah satunya yaitu jadwal pameran dan promosi wisata di dalam negeri dan di luar negeri sudah terjadwal. Faktor yang menghambat promosi wisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga salah satunya yaitu terbatasnya dana yang dianggarkan sehingga belum dapat memaksimalkan promosi wisata. Upaya mengatasi hambatan kegiatan promosi wisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung adalah dengan menjalin
--	--	-------------------------	---

			kerjasaa dengan kelompok sadar wisata Kabupaten Temanggung, kerjasama dengan pihak swasta, seperti Cendana Giri dan Jogokerso Community
--	--	--	--

E. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Kolaborasi

a. Definisi

Collaborative governance merupakan bentuk baru dari proses tata kelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang berbeda dalam hubungan kerja satu sama lain melalui dialog rutin dan interkasi dalam mengejar tujuan bersama (Innes dan Booher, 2004; Huxham 2000).

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stekholder di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007, dalam Setyoko 2011: 15)(Sufianti et al. 2013)

Menurut O’Leary dan Bingham dalam Sudarmo (2015: 195) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah

yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian.

Bardach dalam Sudarmo (2015: 195) yang mendefenisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan *public value* ketimbang bekerja sendiri-sendiri.(Haryono 2012)

Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset. (Ansell and Gash2007 dalam Subarsono (2016: 175).

b. Tahapan-Tahapan Kolaborasi

Menurut Anshell dan Gash (2008) Proses Kolaboratif terdiri dari berbagai tahapan yaitu dimulai adanya :

1. Dialog secara tatap muka (*face-to-face dialogue*)

Adanya forum bersama sehingga para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait mampu menyampaikan kegiatan maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam kolaborasi. Dengan diadakan dialog secara tatap muka maka dapat menimalisir atau tidak menimbulkan tumpang tindih kepentingan. Contoh kegiatan secara *Face to face* adalah pelatihan dan sosialisasi.

2. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Timbulnya inovasi *collaborative governance* salah satunya disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diantara para *stakeholders*. Adapun prinsip dalam membangun kepercayaan :

- a. Rasa saling percaya didasarkan pada hubungan profesionalisme atau hubungan sosial.
- b. Keyakinan bahwa para aktor mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha aktor lainnya dalam suatu jaringan, untuk mencapai tujuan bersama.

Maka dalam penelitian ini, pemerintah mempercayakan informasi-informasi atau usaha-usaha aktor lainnya, yaitu swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu untuk melanggengkan kepercayaan, maka dibutuhkan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan.

3. Membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*)

Komitmen diantara *stakeholders* merupakan hal penentu terhadap berhasil tidaknya proses *collaborative governance*. Dengan komitmen maka akan menimbulkan keyakinan bahwa dengan *collaborative process* akan menciptakan keuntungan untuk masing-masing pihak dan kepentingan publik.

Komitmen untuk berproses memiliki arti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan adalah cara yang terbaik. Dengan adanya

perundingan maka kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Prosedur yang jelas, adil, dan transparan sangat penting untuk komitmen.

4. Berbagi pemahaman (*shared understanding*)

Dalam berkolaborasi para *stakeholders* harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama. *Shared understanding* merupakan penyamaan persepsi tentang pengetahuan atau pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

5. Hasil sementara (*intermediate outcome*)

Kolaborasi akan sangat mungkin terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari proses kolaborasi terlihat hasilnya. Dari hasil proses kolaborasi tersebut diartikan dapat membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan ini akan memberikan *feedback* ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.(Tresiana 2017)

c. Prinsip-Prinsip Kolaborasi

Prinsip saling menghormati, prinsip saling menghargai, prinsip saling kerjasama, prinsip saling memberi kemanfaatan, prinsip saling asah, asih dan asuh, selanjutnya prinsip saling percaya.(Kristian 2017)

2. Teori Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.(Rusita, Rahmat Walimbo, Yunita Sari 2016)

Menurut Soewarno (dalam Surya :2012) mengemukakan bahwa “pengelolaan adalah pengendalian dalam menyelenggarakan berbagai sumberdaya dengan berhasil dalam rangka mencapai sasaran”

b. Langkah-langkah pengelolaan

Menurut Afifidin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah-langkah pengelolaan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana

5. Menentukan standar kerja
6. Menentukan ukuran untuk menilai
7. Mengadakan pertemuan
8. Pelaksanaan
9. Mengadakan penilaian
10. Mengadakan review secara berkala
11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

c. Fungsi pengelolaan

Menurut Terry Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Sedangkan menurut John D. Millet dalam Burhanudin (1994:34) fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

3. Teori Obyek Wisata dan Pariwisata

a. Pengertian Objek Wisata

Pengertian obyek dan daya tarik wisata menurut Marpaung (2002:78) adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Obyek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan *travel motivation* dan *travel*

fashion, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya. (Pengantar 2017)

b. Pengertian Objek Wisata Alam

Wisata alam adalah suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi (Direktorat Pemanfaatan Alam dan Jasa Lingkungan, 2002)(Certini et al. 2014)

c. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata menurut Mc. Intosh dan Goelder (dalam Surya : 2012) adalah ilmu atau seni dan bisnis yang dapat menarik dan menghimpun pengunjung, termasuk didalamnya berbagai akomodasi dan catering yang dibutuhkan dan diminati oleh pengunjung.

Pengertian pariwisata menurut Salah Wahab (2003:143) mengatakan bahwa: Pariwisata adalah perpindahan sementara organisasi dari bermacam-macam tempat tinggal, iman dan agama dan yang mempunyai pola hidup yang berbeda, beragam harapan, banyak jenis kesukaan dan hal-hal yang disukai, serta motivasi-motivasi yang tidak dapat dibuat standarnya karena kesemuanya ini adalah ungkapan pikiran dan endapan perasaan serta tingkah laku yang berubah dalam jangka panjang menurut tempat dan waktu.

Menurut Hari Karyono (1997:15) memberikan definisi secara umum dan secara teknis mengenai pariwisata bahwa: Secara umum, definisi pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usah dan masyarakat untuk mengatur mengurus dan melayani apa yang dibutuhkan wisatawan. Sedangkan definisi secara teknis ,bahwa pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia yang dilakukan perorangan maupun kelompok di tempat wisata yang berada di negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan layanan jasa berupa kemudahan dan lain-lain yang diadakan atau dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk dapat tercapainya keinginan wisatawan.

2. Ciri-ciri pariwisata

Menurut Desky (1996:6) ciri-ciri pariwisata yaitu sebagai berikut:

- a. Berupa perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asal.
- b. Pelaku perjalanan hanya tinggal untuk sementara waktu.
- c. Perjalanan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- d. Ada organisasi atau orang yang mengatur perjalanan tersebut
- e. Terdapat unsur-unsur produk wisata
- f. Ada tujuan yang ingin dicapai dari perjalanan wisata tersebut.
- g. Biaya perjalanan diperoleh dari negara asal.
- h. Dilakukan dengan santai.

3. Tujuan Pariwisata

Menurut Desky (1999:8) tujuan pariwisata, yaitu sebagai berikut:

- a. Keinginan bersantai.
- b. Keinginan mencari suasana lain.
- c. Memenuhi rasa ingin tahu.
- d. Keinginan Berpetualang
- e. Keinginan mencari Kepuasan

F. Definisi Konseptional

Konsep merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu keadaan yang akan diteliti serta didalamnya yang meliputi keadaan suatu kelompok ataupun individu yang akan menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi adalah konsep yang menggambarkan bentuk aktivitas bersama oleh dua organisasi atau lebih yang berkerjasama untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak mudah dipecahkan bila dilakukan sendiri sendiri, dilain sisi kolaborasi atau aktivitas yang dilakukan dua organisasi yang bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan *public value* atau nilai publik.
2. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti pengorganisasian, pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam

pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

3. Obyek Wisata alam Posong adalah suatu kegiatan perjalanan wisata yang kegiatan tersebut dilakukan untuk menikmati gejala keunikan alam di Taman Wisata Alam Posong. obyek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan *travel motivation* dan *travel fhasion* , karena pengunjung atau wisatawan ingin mengunjungi suatu daerah obyek wisata serta ingin mendapatkan pengalaman dari kunjungan tersebut.
4. Pariwisata Posong merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk memnuhi keinginannya yaitu berupa menikmati perjalanan dan keindahan Obyek Wisata Alam Posong dan fasilitas yang disediakan yang bersifat sementara.

G. Definisi Operasional

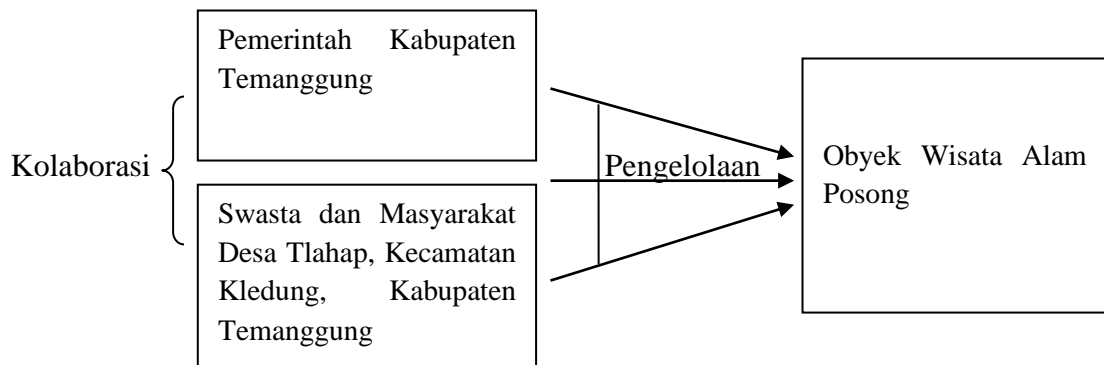
Berikut gambaran definisi operasional dalam penelitian ini:

Tahapan dalam kolaborasi

Menurut Anshell dan Gash (2008) Proses Kolaboratif terdiri dari berbagai tahapan yaitu dimulai adanya:

- a. Dialog secara tatap muka (*face-to-face dialogue*)
- b. Membangun kepercayaan (*trust building*)
- c. Membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*)
- d. Berbagi pemahaman (*shared understanding*)
- e. Kemudian terbentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*). (Tresiana 2017)

H. Alur Pikir



I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Rahmawati Dian Eka (2014 : 13) penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif bisa berupa kata-kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati di lapangan. Dengan penjelasan seperti itu maka penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan

keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.(Andriyani, Martono, and Muhammad 2017)

2. Lokasi Penelitian

Dalam penetapan penelitian maka penulis menentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Sugiyono dalam bukunya mengatakan bahwa purposive merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dengan pertimbangan karena di Desa Tlahab terdapat obyek wisata yang dewasa ini cukup terkenal yang bernama Obyek Wisata Alam Posong. Eksistensi Obyek Wisata Alam Posong ini tentunya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dan Masyarakat atau swasta sekitar yaitu warga Desa Tlahab dan investor. Oleh hal tersebut peneliti ingin mengetahui kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong; apakah kerjasama kolaborasi pemerintah dan masyarakat sudah berjalan baik dalam pengelolaan obyek wisata tersebut.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang-orang yang paham mengenai permasalahan yang sedang atau akan diteliti. Menurut Moleng bahwa subjek penelitian adalah orang yang bisa dimanfaatkan dalam suatu penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu penelitian. Teknik penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu memilih subjek berdasarkan cirri-ciri tertentu yang sudah diketahui sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian. Maksud dari teknik purposive yaitu memilih dengan sengaja subjek yang akan diwawancarai.

Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Pengelolaan Objek Wisata Alam Posong dan Masyarakat sekitar.

Tabel 1.2 Subjek Penelitian

No	Narasumber	Keterangan
1	Pihak Pemerintah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung
2	Pihak Swasta	Pemilik Taman Wisata Alam Posong
3	Pihak Masyarakat	Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong

4. Unit Analisis Data

Unit Analisis data pada Penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Investor Objek Wisata Alam Posong dan Masyarakat sekitar Objek Wisata Alam Posong.

Table 1.3 Unit Analisis Data

Stakeholders Objek Wisata Alam Posong	Jumlah Responden
Kepala Dinas	1
Kepala Desa	1
Kepala Dusun	1
Anggota BUMDES	1
Anggota Pokdarwis	1
Pemilik Taman Wisata Alam Posong	1
Masyarakat	1
Jumlah	7

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian mengenai kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata alam posong di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2018. Pihak yang akan dijadikan sumber data yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Kepala Desa Tlahab, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong. Dalam

memperoleh data yang lebih akurat, sumber data bisa dibagi lagi dengan beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Narimawati (2008;98) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” bahwa; Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang akan kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung pada tahun 2019, yang diperoleh langsung dari unit analisis yang akan dijadikan objek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini yang akan dijadikan objek yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Kepala Desa Tlahab, Kepala Dusun, serta tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Menurut Uma Sekaran(2011) data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan

seterusnya. Peneliti menggunakan data sekunder karena untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan aparat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat. (Sopari, Oka, and Salman 2014)

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang mempunyai maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan atau bisa disebut juga (*interviewer*) dan terwawancara yaitu sebagai yang memberikan suatu jawaban yang relevan dan dirasa tau mengenai suatu informasi tertentu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (*interviewee*) menurut Moleong (2004:186). Jadi wawancara itu mempunyai tujuan untuk menggali informasi lebih dalam dari narasumber, oleh pewawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Sedangkan dalam melakukan wawancara ada dua macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada narasumber yang sudah tersusun sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Dan wawancara tidak terstruktur adalah pertanyaan yang tidak menggunakan daftar pertanyaan (spontan) akan

tetapi hanya berdasarkan pedoman pertanyaan yang dibuat secara garis besar saja.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2019, peneliti akan mewawancarai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Kepala Desa Tlahab, Kepala Dusun, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Tlahab.

b. Dokumentasi

Menurut Rahmawati Dian E (2014:33) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan macam-macam dokumen atau catatan yang bisa menjelaskan keadaan konsep yang sedang diteliti, didalam unit analisis yang selanjutnya akan dijadikan menjadi onjek penelitian. Dokumentasi tersebut bisa berupa dokumen resmi, arsip, berita dari media massa cetak, jurnal serta biograpi. Dokumentasi ini dianggap cocok untuk penelitian ini karena sebelum terjun ke lapangan langsung peneliti hanya mendapatkan sebagian besar informasi-informasi yang relefan dari berbentuk dokumen-dokumen resmi untuk mendapatkan suatu informasi mengenai subjek penelitian.

c. Observasi

Menurut Rahmawati Dian E (2014:31) observasi adalah cara pengumpulan data mengenai konsep penelitian di dalam unit analisis penelitian, yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung . jadi

observasi tersebut cara memperoleh data dengan melihat langsung terhadap objek penelitian guna untuk mendapatkan suatu gambaran penelitian. (Studi and Administrasi 2012)

7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:246-252) adapun model analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model alir, dimana sebelum peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber maka peneliti sudah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap jawaban yang akan diwawancarai. Bila jawaban yang didapat dari narasumber kurang setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai mendapatkan suatu informasi yang dianggap kredibel. Dalam jenis penelitian kualitatif hanya bisa dilakukan secara terus menerus sehingga bisa mendapatkan sebuah data yang diinginkan .

Aktivitas dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data merupakan yaitu merangkum, memilah hal-hal yang dianggap penting, memfokuskan pada suatu tujuan, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam melakukan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat. Bagan, hubungan antara

kategori *flowhert* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja selanjunya berdasarkan dengan apa yang sedang difahami tersebut.

c. Verification (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah seiring waktu bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan awal didukung dengan data yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. (Pariwisata et al. 2012)